

PENGUATAN TOLERANSI BAGI PEMAJUAN BUDAYA KEAGAMAAN: STUDI ATAS PRAKTIK TOLERANSI AGAMA DI PUJA MANDALA BALI

STRENGTHENING TOLERANCE FOR THE ADVANCE OF RELIGIOUS CULTURE: A STUDY ON THE PRACTICE OF RELIGIOUS TOLERANCE IN PUJA MANDALA, BALI

Muhammad Nur Prabowo Setyabudi

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

mnurpsb@gmail.com

Artikel diterima 26 April 2020, diseleksi 1 Mei 2020, dan disetujui 12 Desember 2020

Abstract

Tolerance is acknowledged as the principle of national cultural advancement agenda as it has been planned by the government through The Law No. 5 of 2017. In this matter, the advancement of religious culture encourages the concept of diversity and religious management. This research discusses about how the conception of a more mature tolerance for religious management and the advancement of religious culture in Indonesia. By referring the local wisdom and reflecting the tolerance portraits of the field research in one of the tolerance center in Puja Mandala Bali, this research delivers a description and analysis upon a more ultimate model of tolerance. The writer uses a transformative approach to elaborate the concept of tolerance which emphasizes on the respect of equality between the majority and minority. The conclusion shows that the religious culture projection in the future to establish an excellent tolerance urges to leave a permissive and dominative tolerance and to brace a mutualistic and reciprocal tolerance with mutual relations (mutual-respect and mutual-recognition) as it has been projected by the people in Puja Mandala. This research also emphasizes the significance of the art, philosophy and science for the cultural approach toward interreligious harmony.

Keywords: *Tolerance, Cultural Advancement, Puja Mandala, Religious Harmony.*

Abstrak

Toleransi ditahbiskan sebagai asas bagi agenda pemajuan kebudayaan nasional sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah melalui UU No. 5 Tahun 2017. Dalam hal ini, pemajuan budaya agama menuntut konsepsi manajemen pengelolaan keyakinan dan keberagamaan. Penelitian ini mempersoalkan bagaimana konsepsi toleransi yang lebih matang bagi manajemen keyakinan dan pemajuan budaya keagamaan di Indonesia. Dengan menilik kearifan lokal dan bercermin pada potret toleransi dari hasil studi lapangan di salah satu simpul toleransi di Puja Mandala Bali, tulisan ini memberikan deskripsi dan analisis atas model toleransi yang lebih ultim. Penulis menggunakan pendekatan transformatif untuk mengelaborasi konsepsi toleransi yang menekankan pada penghormatan kesederajatan daripada hubungan mayoritas-minoritas. Kesimpulan menunjukkan, bahwa proyeksi budaya agama di masa depan untuk menciptakan toleransi yang lebih mantab menuntut menanggalkan watak toleransi yang permisif dan dominatif kepada toleransi yang mutualistik dan resiprokal dengan pola hubungan kesalingan (*mutual-respect* dan *mutual-recognition*) sebagaimana diproyeksikan oleh masyarakat di Puja Mandala. Studi ini juga menegaskan signifikansi seni, filsafat, dan ilmu bagi pendekatan kultural menuju harmoni antaragama.

Kata Kunci: Toleransi, Pemajuan Kebudayaan, Puja Mandala, Harmoni Agama.

PENDAHULUAN

“If we don’t stand up for tolerance and moderation and respect for others, if we begin to doubt ourselves and all that we have accomplished, then much of the progress that we have made will not continue...” (Barack Obama, Jakarta, 1 Juli 2017).

Setiap komunitas tentu menghadapi problem toleransi karena toleransi, kata Reiner Forst (2013), terjadi dalam setiap relasi moral dan praktik kekuasaan. Di mana ada praktik kekuasaan, di situ bersinggungan dengan problem toleransi. Konsep dasar toleransi, sebagaimana demokrasi, diterima secara mendasar, tapi konsepsi dan operasionalisasinya bisa beragam. Praktik toleransi terjadi dalam konteks vertikal antara negara dengan warga, pemerintah sebagai representasi mayoritas dan kelompok-kelompok minoritas, dan konteks horisontal individu atau kelompok warganegara.

Sementara itu, Indonesia sebagai bangsa yang plural dikenal sebagai Zamrud Toleransi (*Emerald Chain of Tolerance*) karena memiliki kekayaan filosofi, khasanah budaya, kearifan lokal, simbol, figur, dan praktik toleransinya yang tersebar diberbagai lanskap Nusantara (Simarmata, 2018). Status ini tampaknya dapat dijadikan cermin untuk melihat situasi yang kurang kondusif akhir-akhir ini ketika banyak problem struktural dan kultural yang terjadi sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip toleransi, khususnya toleransi agama. Meski versi pemerintah mengatakan tendensi toleransi semakin meningkat, tapi legasi kebijakan yang kontroversial, katakan seperti aturan pendirian rumah ibadah, dan banyaknya pelanggaran kekerasan menyebabkan tegangan dan disparitas kompleks antara klaim dengan kenyataan. Klaim toleransi itu tak pelak menjadi, istilah Sidney Jones, *contentious*, kontroversial (Fealy & Ricci, 2019). Zamrud Toleransi pun menghadapi situasi dilematis.

Pada tataran struktural, negara dinilai masih bersikap ambigu dalam hal perlakuan terhadap minoritas, mengingat banyak kelompok minoritas yang lemah di negeri ini masih berada pada posisi dilematis akibat dari berlakunya formasi yang disebut Burhani sebagai *delimited pluralism*: adanya “favoritisme” dalam memperlakukan kelompok keagamaan. Bahkan negara seringkali justru terjebak dalam praktik kekuasaan atau perlakuan diferensiatif, memposisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang berbeda dan ‘kelas kedua’, seperti yang dialami, misalnya, kelompok Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok-kelompok kepercayaan (Burhani, 2014, 2019, 2020). Human Right Watch mencatat tahun 2019 masih terjadi penyerangan oleh Islamis militan terhadap 6 anggota jemaat Ahmadiyah, memaksa 24 orang dari 7 keluarga mengungsi (Watch, 2019). Pada akhirnya pemerintah dinilai tidak cukup serius melindungi dan menegakkan toleransi dan pluralisme dalam negara demokrasi. Di sinilah letak kritik Marshall bahwa toleransi dan kebijakan pro-toleransi di Indonesia masih ada ambiguitas: secara konstitusional mengakui kebhinekaan, tetapi pada tataran kebijakan seringkali kontradiktif dengan prinsip kebebasan beragama (Al-Khanif, 2015; Ali-Fauzi, 2017; Marshall, 2018).

Pada tataran kultural, menurut beberapa survei, dukungan terhadap toleransi dan kebebasan beragama masih relatif rendah, bahkan tendensinya semakin melemah. Pada level sosial, misalnya, masyarakat masih merasa enggan hidup bertetangga dengan orang yang berbeda identitas agama. Di beberapa tempat, pendirian tempat ibadah masih mengalami kesulitan karena terbentur oleh aturan-aturan yang dinilai politis dan tidak adil (Burhani, 2019; Pamungkas, 2014). Modal sosial-budaya yang toleran tergerus oleh pemahaman konservatif yang banyak menyokong praktik intoleransi seperti: perusakan

tempat ibadah seperti kasus di Tolikara dan Singkil, persekusi dan ancaman terhadap kelompok minoritas. Banyak ahli yang menggugat, ke mana wajah budaya Nusantara yang toleran, yang murah senyum (*smiling face of religious culture*), keagamaan yang berbudaya, menghargai adat seperti dahulu? (Burhani, 2019; Saat & Ibrahim, 2019).

Apakah citra Zamrud Toleransi sudah memudar? Sejumlah penelitian mutakhir memang menjustifikasi perubahan wajah muram budaya keagamaan. Budaya keagamaan yang dimaksudkan disini adalah keagamaan yang sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang beragam dan berbudaya, sehingga karakteristiknya adalah lebih menjunjung tinggi nilai-nilai seperti toleransi, menghargai perbedaan, menerima keberagaman, dan keberadaban publik. Citra keagamaan yang ramah lagi santun itu memudar dengan menguatnya faham konservatisme keagamaan sejak Reformasi (Kersten, 2018; van Bruinessen, 2014), euforia demokratisasi pasca Reformasi, ketidakpercayaan terhadap politik karena kegagalan demokrasi, dan gagalnya dakwah keagamaan (Asshiddiqie, 2014; Raharjo, 2011; Zuhro, 2017); nasionalisme yang didasarkan pada semangat kebangsaan hendak direduksi menjadi nasionalisme yang didasarkan pada formalisme agama (Menchik, 2016; Suaedy, 2017). Menguatnya orientasi politis keagamaan dan sentimentalisme disetiap momentum politik juga tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor meningkatnya intoleransi; pluralisme agama digeser oleh konservatisme moral dan keagamaan populistik (Hadiz, 2019).

Fenomena-fenomena ini menjadi indikasi pasang surut budaya keagamaan di Indonesia yang sedang mengalami problem moral dan intelektual pada aspek toleransi. Toleransi yang diimajinasikan bersama kini tak lagi cukup bertaji, prinsip-prinsipnya diingkari, sehingga

terjebak dalam makna *eufimisme* semata, lebih banyak mengandung alibi untuk membiarkan dan menutupi ketidakadilan kultural dan struktural yang terjadi (Burhani, 2019; Sugiharto, 2019). Meskipun tidak ada bangsa yang tidak lepas dari problematika toleransi, tetapi yang lazim dilakukan adalah mengambil pelajaran dari setiap fakta intoleransi, belajar dari pengalaman sejarah masa lalu, dari praktik sosial yang ada, untuk memperbaiki kualitas budaya toleransi di masa depan.

Sebagaimana nukilan dari pidato Barack Obama di awal, dan konsisten dengan ide Pemajuan Kebudayaan Nasional yang mendasarkan pada asas toleransi dan keberagaman (pasal 3), Zamrud Toleransi sesungguhnya sedang memerlukan agenda *penguatan toleransi* yang seharusnya berangkat dari akar sejarah sendiri. Toleransi menjadi elemen penting bagi pemajuan budaya beragama yang berwawasan multikultur. Tantangan intoleransi yang dihadapi tidak cukup dibayar dengan toleransi minimalis ambigu (Marshall, 2018), eufemistik (Burhani), basa-basi murahan (Koffeman, 2016), melainkan toleransi yang serius, *costly tolerance*, dengan merancang ulang manajemen pengelolaan keberagaman di Indonesia sepadan dengan imajinasi harmoni yang diharapkan. Perlu usaha serius melihat kembali praktik toleransi dalam kebudayaan, menjahit kembali tenunan Nusantara yang tersayat, mengambil kembali untaian mutiara kearifan yang terserak, mendengar suara para tokoh, dan merangkai kembali konsepsi pada simpul-simpul toleransi yang telah tumbuh subur di berbagai lanskap Nusantara.

Studi ini menunjuk salah satu simpul toleransi beragama di Bali yaitu kompleks Puja Mandala dan menganalisis konsepsi toleransi yang dipraktikkan. Tujuannya adalah menggali bagaimana hubungan kelompok mayoritas dan

minoritas di sana, menampilkan modus, aneka norma, tindakan dan ekspresi toleransi, dan implikasinya bagi Bali secara lebih luas. Terlebih di tengah upaya konsolidasi keagamaan dalam suasana memori tragedi Bom Bali 2002, pada khususnya, dan kuatnya pengaruh intoleransi di Indonesia, pada umumnya, maka melihat eksistensi Puja Mandala dalam memberikan pengaruh sosial menjadi sangat relevan bagi penguatan konsolidasi keagamaan. Kompleks ini dipilih karena dikenal sebagai satu ikon toleransi yang telah menarik perhatian internasional sehingga eksistensinya sangat signifikan dan patut diperhatikan sebagai referensi penguatan toleransi di Indonesia. Beberapa literatur telah memberikan informasi umum tentang Puja Mandala, tetapi tidak cukup kritis dan reflektif dalam melihat konsepsi toleransi beragama.

Ide penguatan toleransi secara konseptual di sini diinspirasi oleh konsepsi Rainer Forst tentang matra-konsepsi toleransi (Balint, 2016; Di Blasi & Holzhey, 2014; Fernández, 2008; Forst, 2012, 2013; Setyabudi, 2019b, 2019a, 2020; Sugiharto, 2017, 2019). Forst melihat toleransi lebih sebagai transformasi sikap moral daripada sebagai nilai moral itu sendiri, dan melihat toleransi sebagai upaya rasionalisasi moralitas dan kekuasaan. Pendekatan transformatif perspektif Rainer Forst yang memetakan transformasi toleransi dari berwatak permisif dominatif kepada toleransi berkarakter resiprokal dipakai sebagai *framework* karena sesuai dengan ide penguatan toleransi dan pemajuan kebudayaan nasional. Dalam *Toleration in Conflict* (2013), ia mengemukakan empat matra-konsepsi toleransi yang hierarkis: konsepsi toleransi sebagai *permisi*, dalam konstelasi mayoritas sebagai pemberi bagian kekuasaan pada minoritas; kedua konsepsi toleransi sebagai *ko-eksistensi*, dalam konstelasi pluralitas kelompok yang menjalin toleransi secara pragmatis; ketiga, konsepsi

toleransi sebagai penghormatan, dalam konstelasi pluralitas kelompok yang saling menghormati dalam resiprokalitas kesetaraan atas dasar otonomi; keempat, konsepsi toleransi sebagai pengakuan atas pluralitas kelompok yang menjalin toleransi dengan saling mengakui eksistensi dalam kesederajatan satu sama lain atas dasar penghargaan mendalam terhadap keragaman identitas. Keempat konsepsi tersebut mencerminkan perbedaan tingkat dan karakteristik toleransi. Toleransi sebagai penghormatan dan pengakuan secara resiprokal menunjukkan tingkat toleransi mendalam (Setyabudi, 2020). Pendekatan Forst ini menjadi kerangka berpikir untuk memahami ragam karakteristik toleransi.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi lapangan. Pendekatan transformatif (*transformative approach*) digunakan sebagai dasar berpikir untuk menguatkan konsep toleransi yang tidak hanya berdasar hubungan mayoritas-minoritas atau ko-eksistensi pragmatis, tetapi juga saling menghormati atas dasar kesetaraan. Tujuan penelitian ini yaitu mengungkap dan menganalisis lebih jauh konsepsi, norma, praktik, dan ekspresi toleransi yang utama dalam satu komunitas agama. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi pustaka, observasi partisipatoris, dan wawancara mendalam. Objek penelitian ini adalah konsepsi toleransi yang dipraktikkan di kompleks Puja Mandala. Data penelitian meliputi perkataan lisan hasil wawancara beberapa tokoh agama dan atau individu yang terlibat dalam praktik, gambar, dan informasi literatur sekunder. Data dianalisis dan diuraikan secara tematik mengacu pada konsepsi toleransi paling dasar yang didasari dengan penerimaan minoritas, kemudian motivasi ko-eksistensi, dan resiprokalitas respektif sebagai karakteristik toleransi paling utama.

PEMBAHASAN

Hubungan Mayoritas-Minoritas Agama

Salah satu konstelasi utama toleransi adalah hubungan kelompok mayoritas dan minoritas. Hubungan ini biasanya ditandai peran dominan kelompok mayoritas dan penerimaan secara bersyarat, di mana eksistensi minoritas diterima dengan prasyarat tertentu. Bahkan tidak jarang terjadi intoleransi yang tidak dibenarkan terhadap eksistensi kelompok minoritas, baik berupa diskriminasi, persekusi, perusakan tempat ibadah, atau kekerasan terhadap kelompok minoritas. Namun Puja Mandala, satu-satunya kompleks peribadahan di dunia yang memiliki lima tempat ibadah dalam satu lokasi dan berdiri secara berdampingan, menyuguhkan suasana sebaliknya: penerimaan kelompok mayoritas terhadap minoritas dan terjalin toleransi mutualistik yang relatif egaliter dan damai meski penerimaan itu dicapai melalui proses yang cukup dinamis.

Puja Mandala merupakan pusat peribadahan penting di mana ada lima tempat ibadah agama besar: Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Hindu berdiri dalam satu kompleks berdampingan satu sama lain, yaitu Masjid Agung Ibnu Batutah, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit Dua, dan Pura Jagatnatha (*Gambar 1 dan Gambar 2*). Kompleks ini terletak di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Letaknya strategis di pinggir jalan utama menuju pusat wisata pantai Nusa Dua. Dibangun sejak 1994, luas bangunan kompleks beserta tanahnya sekitar 2 hektar, terbagi rata untuk lima tempat ibadah. Selain fungsi utamanya sebagai tempat beribadah, kompleks ini juga dijadikan tujuan wisata religius karena tersohor dengan citra toleransi dan kerukunan umat beragama.



Gambar 1. Di antara bagian Kompleks Puja Mandala: Masjid Ibnu Batutah bersanding dengan Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa (Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 2. Bagian lain Kompleks Puja Mandala: Vihara Budha Guna, Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit Dua, dan Pura Jagatnatha (Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Potret Awal Puja Mandala: Distribusi Kebebasan bagi Kelompok Minoritas

Pada mulanya, pendirian Puja Mandala tidak terlepas dari persoalan kebutuhan tempat ibadah bagi para pekerja pendatang di kawasan Nusa Dua Bali. Banyak pekerja migran di kawasan Nusa Dua Bali yang kebanyakan mereka datang dari Jawa. Sebagai pekerja migran, mereka adalah penganut agama-agama yang notabene minoritas di Bali khususnya di Nusa Dua, yakni Islam, Katolik, Kristen, dan Budha. Sementara mayoritas warga asli di Nusa Dua beragama Hindu, dan tentu mereka tidak akan kesulitan untuk beribadah karena memang Bali

adalah Pulau Seribu Pura. Dulu, karena tidak ada fasilitas tempat ibadah bagi kelompok minoritas di sana, para pekerja harus berjalan jauh ke daerah lain untuk sekedar beribadah. Kantor tempat mereka bekerja rata-rata tidak menyediakan tempat ibadah khusus kecuali di ruang-ruang sempit ala kadarnya. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk ibadah yang sifatnya bersama seperti sholat Jum'at atau misa hari Minggu. Dampak psikologisnya, banyak pekerja merasa kesulitan dan dalam batas tertentu juga kehampaan spiritual karena seringnya meninggalkan ibadah sebagai kebutuhan spiritual mereka. Kendala ini khususnya dirasakan oleh pekerja muslim, terlebih mereka harus beribadah lima kali sehari dan shalat Jum'at berjamaah.

Keadaan tersebut sepertinya direspon cepat oleh pemerintah pusat waktu itu, khususnya dinas Pariwisata, sehingga Joop Ave, menteri pariwisata kala itu, menginisiasi pembangunan tempat ibadah Puja Mandala. Joop Ave sendiri notabene bagian dari minoritas. Dalam proposal yang diajukannya, pendirian tempat ibadah ini didasari oleh pertimbangan praktis, pragmatis dan ideologis. *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan fasilitas ibadah dan spiritual bagi para pekerja migran dari berbagai daerah dan etnis yang ada di Nusa Dua; *kedua*, untuk menggali potensi wisata; *ketiga*, alasan ideologis menciptakan "ikon toleransi" di Pulau Bali (INyoman Darma Putra, 2014). Jadi, pendirian tempat ibadah bersama ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap kelompok minoritas di Bali, selain berkat kebijaksanaan kelompok mayoritas Hindu Bali yang bersedia memberikan kebebasan kepada para pekerja migran non-Hindu.

Pada mulanya tempat itu hendak dinamakan Altar Pancasila, tapi karena tidak adakesepahamantentang pengertian

atau makna nama itu yang dianggap kurang representative bagi sebuah tempat ibadah, maka penamaannya akhirnya sepenuhnya diserahkan kepada penduduk Hindu di sekitar Nusa Dua. Akhirnya disepakati nama Puja Mandala. "Puja" artinya penyembahan, "Mandala" berarti lingkaran, sehingga "Puja Mandala" berarti lingkaran pemujaan dalam suatu kesatuan. Dengan didirikan tempat ibadah bersama ini, para penganut agama minoritas di Nusa Dua merasakan keleluasaan, dan ini juga merupakan toleransi dari mayoritas penganut Hindu di daerah tersebut (wawancara dengan Mukhlis, 20 Februari 2020).

Dengan demikian, sebuah kompleks peribadahan bagi minoritas agama seperti Puja Mandala ini tak akan berdiri tanpa *intervensi* nyata dari pemerintah untuk memperhatikan minoritas agama. Meskipun tanpa dipungkiri, bahwa kepentingan pariwisata sangat dominan di sini. Pada dasarnya, di Bali sendiri termasuk sulit untuk mendirikan tempat ibadah bagi minoritas agama, terlebih ada aturan Perda yang memperketat aturan pendirian rumah ibadah di Bali, dan juga faktor sentimen agama pasca kejadian Bom Bali 2002. Di sisi lain, kesediaan kelompok mayoritas untuk menerima minoritas adalah bentuk nyata toleransi.

Dari Dilema Minoritas, Dominasi Mayoritas, Penerimaan Bersyarat, hingga Ikon Toleransi

Pendirian Puja Mandala terutama didasari alasan praktis mengatasi persoalan pemenuhan hak beribadah masyarakat pendatang, khususnya, dan kelompok-kelompok minoritas umumnya yang selama ini mengalami dilema minoritas terkait fasilitas tempat ibadah. Pertama kali ide itu muncul, kelompok-kelompok minoritas menyambutnya dengan sangat antusias di tengah sulitnya mendirikan tempat ibadah di Bali.

Sekalipun itu adalah agenda pemerintah, tetapi sejak awal melibatkan partisipasi publik atau masyarakat. Pemerintah, melalui *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC) –kini *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC), menyediakan lahan kosong, adapun komunitas agama masing-masing yang membangun bangunan ibadah secara swadaya sesuai model yang dikehendaki.

Namun, proses pembangunan itu boleh dibilang tidak cukup mulus karena konon sempat diwarnai beberapa penolakan dari sebagian kelompok Hindu Bali sehingga harus melalui proses negosiasi. Penolakan ini, boleh jadi, karena konservatisme ideologis, sikap tidak toleran, pertimbangan pragmatis mayoritarianisme yang merasa bahwa tempat ibadah ini akan menghilangkan citra wisata Pulau Bali yang sudah dikenal sebagai mayoritas Hindu. Salah satu alasan itu tampak seperti pernyataan pengurus PHDI yang dikutip Putra (2014), bahwa ‘pendirian itu bukan untuk kepentingan kelompok Hindu (baca: mayoritas), tetapi agenda melalui pemerintah Pusat agar pengikut agama-agama lain (baca: minoritas) punya tempat ibadah di sana’.

Tarik-menarik kepentingan itu boleh dikatakan merupakan bagian wajar dari negosiasi politis. Politis karena ini melibatkan tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat Hindu di Bali dan Nusa Dua, kelompok minoritas, dan pemangku kepentingan pariwisata. Putra menjelaskan, dalam hierarki pemerintahan yang sentralistik, otoritas daerah dihadapkan pada otoritas pusat yang hegemonik. Negosiasi itu harus berakhir dengan penerimaan bersyarat, bahwa tempat peribadahan itu harus dibangun di luar kompleks Nusa Dua agar bisa disepakati dan direalisasikan. Dengan begitu, sikap mayoritas ini tampak ambigu, karena berdiri sebagai

pemegang otoritas selaku pihak mayoritas yang memberikan kebebasan dan mendistribusikan sebagian otoritasnya kepada minoritas. Oleh karena syarat itu ia menyangsikan: “*the Hindu Balinese, the dominant majority of the island, are not really involved in the Puja Mandala*” (Putra, 2017; Putra, 2014). Meski dalam hal ini mayoritas Hindu dapat dikatakan sudah cukup toleran, penerimaan bersyarat kelompok mayoritas terhadap minoritas itu, sampai batas tertentu, merupakan ekspresi toleransi yang minimal, yang sebetulnya dapat dipupuk dan dikembangkan lagi kepada penerimaan tanpa syarat.

Di luar aspek konstitutif terkait pelayanan tempat ibadah, yang menarik adalah pertimbangan ideologis ternyata juga menjadi *ration de etre* dari pendirian kompleks ini. Konon pemerintah pusat waktu itu sedang menggalakkan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* dan ideologi Pancasila, dan Puja Mandala dianggap sebagai representasi toleransi agama yang sedang dipromosikan pemerintah sebagai manivestasi prinsip ini. Hal yang sama sebelumnya dilakukan lewat pendirian Taman Mini Indonesia Indah yang dianggap citra dari kebhinekaan adat, suku, dan budaya di Indonesia yang diikat toleransi. Namun, program ini tentu tidak akan terealisasi tanpa dukungan, meski tak sepenuhnya murni, dari masyarakat Hindu Bali yang menyepakati program afirmasi pemerintah ini.

Kini Puja Mandala telah selesai dibangun, dikembangkan, dan menjelma menjadi satu-satunya tempat peribadahan di dunia yang memiliki lima tempat ibadah dalam satu kompleks secara berdampingan. Puja Mandala juga semakin menunjukkan reputasinya sebagai ikon atau miniatur toleransi agama di Pulau Bali. Banyak yang optimis berharap agar Puja Mandala dijadikan panutan bagi daerah-daerah yang lain, dan menjadi sarana edukasi toleransi dan keberagaman (Haloho, n.d.;

Rahman, 2019; Sudarsana et al., 2019; D. Waruwu, 2018; Waruwu, 2017; Waruwu & Pramono, 2018), meski ada juga yang menyangsikan (Puspa, 2015; Putra, 2014).

Syamsuddin, salah satu staf keamanan ITDC menuturkan bahwa toleransi di sini diwujudkan dengan saling membantu mengamankan dan melaksanakan ibadah agama lain. Jika ada kegiatan muslim, umat Kristen tak segan turut serta membantu pelaksanaan kegiatan. Begitu juga sebaliknya. Ia sendiri pekerja pendatang dari Bima, hampir 20 tahun bekerja di Nusa Dua. Ia sangat bersyukur dengan adanya tempat ibadah Puja Mandala. Ia dahulu mengaku tidak bisa disiplin beribadah ketika belum ada tempat ibadah, tapi kini ibadahnya menjadi lebih terjaga (wawancara dengan Syamsuddin, 18 Februari 2020).

Hadirnya Puja Mandala merupakan prestasi pemerintah dalam mengurai permasalahan dan membuka ruang-ruang dialog dan toleransi antar kelompok agama di Bali. Pengalaman dua dekade Puja Mandala dari lahir, tumbuh dan matangnya tersebut memberi inspirasi bahwa problem dilema minoritas dapat diatasi jika otoritas berwenang mampu memberikan ruang toleransi yang cukup bagi minoritas. Namun sebagai kebijakan (*practice*), praktik (*act*) dan kebajikan (*virtue*), toleransi seyogyanya terus dikembangkan oleh aktor-aktornya, yaitu pemerintah dan warga masyarakat.

Mempertahankan ko-eksistensi damai di bawah otoritas paguyuban

Setelah Puja Mandala berdiri, lambat laun jumlah jemaat yang beribadah di sini semakin signifikan. Sehari-hari, kelima komunitas agama melakukan kegiatan rutin, utamanya adalah ritual ibadah. Selain itu, tampak juga kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pendidikan keagamaan diniyah TPA di Masjid dan forum jemaat di Gereja Katolik. Selain

sebagai tempat ibadah harian, di sini juga sering digunakan untuk upacara keagamaan tertentu seperti akad nikah di Masjid atau Gereja. Kompleks ini tak pernah sepi pengunjung, baik untuk beribadah maupun sekedar berkunjung menikmati suasana religius.

Terkecuali mungkin Pura Jagatnatha yang sepertinya tak menunjukkan jumlah signifikan dari sisi jemaat. Pada Galungan yang lalu (18 Februari 2020) tak tampak perayaan besar seperti halnya Pura besar yang lain. Menurut Darma Putra, masih terdapat keyakinan sebagian penganut Hindu bahwa eksistensi Pura Jagatnatha di kompleks Puja Mandala belum mendapat restu sepenuhnya dari Tuhan, selain juga mengindikasikan faktor *trust* bahwa masyarakat Hindu di Nusa Dua masih merasa kurang simpati dengan pendirian Pura di sana karena dinilai tidak cukup sakral. Sakralitas memang aspek penting bagi mereka (Putra, 2014). Meski begitu, ritual ibadah dan pemujaan di Pura Jagatnatha tetap berjalan sebagaimana agama lain. Selain itu, dalam kepengurusan organisasi di kompleks itu, pemuka Hindu lokal di sana juga memberikan kontribusi yang sangat besar.

Hadirnya Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKAUB), sejak 18 Februari 2010 tak lepas dari kontribusi pemuka Hindu lokal di sana, terutama I Wayan Solo, yang sekaligus Lurah Desa Benoa, yang memimpin *Paguyuban* ini. *Guyub* sendiri dalam bahasa Jawa artinya rukun sehingga Paguyuban dimengerti sebagai forum kerukunan beragama. Organisasi ini dibentuk karena kesadaran bersama bahwa kondisi Puja Mandala dengan keragaman identitas agama yang dimiliki tentu amat sangat rentan terhadap konflik dan gesekan, terlebih seiring ramainya Puja Mandala, sehingga dibutuhkan organisasi yang dapat menaungi dan menjaga kepentingan bersama.

Paguyuban ini terdiri dari utusan setiap komunitas agama. Dengan kata lain, setiap komunitas agama memiliki wakil dalam kepengurusan organisasi ini. Dengan otoritas Paguyuban diharapkan ancaman keamanan, kerukunan dan keharmonisan di Puja Mandala dapat diantisipasi, dan jika terjadi konflik dapat diselesaikan melalui forum bersama ini. Dengan begitu, organisasi ini menjadi otoritas bersama yang menaungi semua agama, sarana komunikasi, dan menjadi mediator baik untuk urusan internal maupun eksternal di luar Puja Mandala.

Kehadiran organisasi Paguyuban di tengah komunitas lintas iman seperti ini setidaknya menunjukkan dua hal penting. *Pertama*, menunjukkan kesediaan dan kemauan para pemimpin atau pemuka dari setiap tempat ibadah untuk bekerja bersama dan menjaga harmoni dan toleransi di kalangan umat yang berasal dari latar belakang agama berbeda. *Kedua*, pemuka agama sepertinya menyadari kerentanan hubungan mereka di Puja Mandala, sehingga perlu dijaga dengan hati-hati sekaligus mempersiapkan jalan keluar jika ada konflik. Kedua hal itu sekaligus menunjukkan praktik pemeliharaan harmoni dan toleransi, di bawah payung bersama Puja Mandala (Putra, 2014).

Salah seorang pengurus harian Masjid Ibnu Batutah yang juga merupakan pendatang tetapi menetap di Bali sekaligus anggota di Paguyuban Puja Mandala menuturkan, bahwa pada dasarnya hampir tidak ada masalah terkait aspek teologis (*aqidah*). Sementara, pada aspek sosial-keagamaan (*mu'amalah*), masing-masing kelompok agama sudah memiliki komitmen untuk saling menghargai. Paguyuban Puja Mandala dibentuk sebagai ruang berkomunikasi satu sama lain. Setiap pengurus tempat ibadah mempunyai utusan dalam paguyuban tersebut. Apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik,

biasanya dapat diselesaikan melalui forum bersama tersebut. Paguyuban Puja Mandala juga menjadi ajang untuk mengkoordinir jadwal kegiatan keagamaan agar tidak berbenturan satu sama lain. Ketika kegiatan besar agama ternyata berbenturan, mereka mencari solusi agar semua tetap berjalan dengan lancar. Bahkan hampir setiap perayaan hari raya keagamaan yang berlangsung bersamaan tetapi dapat berjalan lancar (wawancara dengan Muchlas, 14 Februari 2020).

Bagian dari strategi untuk mempertahankan kerukunan antar pemeluk agama di sini adalah, apabila ada yang melangsungkan hari raya agama, mereka harus mengabarkan dahulu, saling meminta izin pada komunitas lain. Selain itu, petugas keamanan dan masyarakat saling menjaga kegiatan peribadahan secara bergiliran. Jika agama Islam yang melaksanakan kegiatan peribadahan atau hari raya, maka petugas yang menjaga keamanan dan mengatur parkir bisa jadi melibatkan jemaat Kristen, Katolik, Budha, Hindu. Toleransi beragama dibangun melalui kerja sama antariman di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan hari raya selalu dibentuk panitia bersama. Dalam kepanitiaan itu juga melibatkan penganut agama lain untuk saling membantu mensukseskan acaranya. Dengan demikian, tinggal bersama dalam satu kawasan menuntut setiap anggota untuk terlibat aktif saling membantu pelaksanaan ibadah, menjaga eksistensi satu sama lain dalam damai (*peaceful co-existence*) dan menjaga keharmonisan.

Tata kelola urusan sosial keagamaan

Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama Puja Mandala juga merupakan representasi ruang publik di mana konsensus tentang perdamaian dibicarakan. Ia adalah ajang komunikasi satu sama lain melalui pertemuan-

pertemuan rutin yang diselenggarakannya sebulan sekali, selain juga lewat komunikasi *whatsapp-group Paguyuban*. Dalam komunitas bersama tersebut, para pemuka agama saling berinteraksi dan saling bertegur sapa. Urusan terkait strategi mempertahankan integrasi dan kerukunan antar umat beragama menjadi bahasan pokok forum ini, termasuk bagaimana manajemen urusan privat atau internal agama, urusan publik atau hubungan antaragama, termasuk hubungan agama dan pemerintah atau pemangku urusan publik yang lebih besar.

Secara arsitektural, manajemen ruang di Puja Mandala memang dibuat sedemikian rupa agar terbangun tata kelola urusan privat dan urusan publik. Untuk urusan internal keagamaan sejak awal pendirian ditetapkan sebagai urusan privat setiap agama, misalnya terkait pembiayaan, pengelolaan rumah tangga, kebersihan, renovasi dan keindahan Masjid, Gereja, Pura atau Vihara, tata cara ibadah sesuai aturan agama masing-masing, manajemen kepengurusan keagamaan seperti pemilihan kyai, pendeta, pastur, pemangku atau biksu, dan yang terpenting, urusan pelayanan pemangku dan pengurus agama dengan umatnya.

Dalam urusan privat, agama yang satu, bahkan pengurus Paguyuban sendiri, tidak boleh melakukan campur tangan terhadap privasi agama lain. Bahkan jika terjadi konversi agama dari agama satu ke agama lain sekalipun, hal itu dianggap bagian dari urusan pilihan keyakinan pribadi. Meskipun ada fenomena konversi agama, tetapi itu tidak mengganggu kerukunan beragama di sini. Banyak fenomena konversi agama di Puja Mandala, baik yang beralih dari Islam ke Hindu, atau Hindu ke Islam, Katolik ke Islam atau sebaliknya. Bahkan diceritakan, ada seorang pemuka Hindu atau *pedande* mengantarkan anaknya

sekolah TPA di Masjid Ibnu Batutah. Sering terjadi juga turis mengkonversi agama ke Islam, tetapi kebanyakan di antara mereka sekedar untuk kepentingan administrasi pernikahan (wawancara dengan Muchlas, 17 Februari 2020).

Salah satu staf keamanan di kompleks, Pak Haris, menuturkan bahwa selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi konflik agama. Sehari-hari aktivitas keagamaan berjalan seperti biasa. Setiap hari penganut agama di sini saling menghormati satu sama lain. Pak Haris sendiri seorang muslim, tetapi dalam pekerjaannya sehari-hari ia menjaga keamanan jemaat. Haris adalah pendatang dari Jawa. Sedangkan istri yang dinikahinya adalah asli Bali, telah berkonversi dari Hindu menjadi muslim, dan dalam keluarganya tidak pernah ada masalah terkait konversi tersebut. Istrinya juga seringkali mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid Batutah (wawancara dengan Haris, 18 Februari 2020).

Adapun bagian dari urusan publik adalah soal kepemimpinan. Di antara faktor penting dalam manajemen kepengurusan publik *Paguyuban* Puja Mandala adalah hadirnya pemimpin yang mampu mengayomi agama minoritas. Sejak pertama kali didirikan pada 18 Februari 2010, *Paguyuban* dipimpin oleh I Wayan Solo, pemimpin yang dipercaya dan dianggap kharismatik dan berpengaruh di masyarakat. Secara kebetulan I Wayan Solo adalah juga Lurah Kelurahan Benoa (selesai menjabat tahun 2018). Wayan Solo dikenal sebagai pribadi yang terbuka, luwes, mengayomi, tidak membeda-bedakan identitas agama. Legitimasinya sebagai pemuka semakin kuat karena otoritas keilmuannya tentang toleransi agama (Waruwu, 2018).

Bagian lain dari wajah ruang publik yang sangat vital adalah halaman kompleks yang banyak difungsikan

sebagai fasilitas keamanan. Aktivitas agama tidak dapat dilepaskan dari lahan parkir yang menjamin keamanan kendaraan jemaat. Di Puja Mandala, tempat parkir adalah fasilitas publik yang sangat besar pengaruhnya bagi kerukunan beragama. Ibarat rumah, dia seperti halaman dan latar depan bagi agama-agama yang menghuni ruang sendiri. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang menerapkan sistem lahan parkir yang eksklusif, di Puja Mandala tempat parkir sifatnya terbuka dan milik bersama, tidak diklaim milik satu agama tertentu, oleh agama mayoritas sekalipun. Secara formal, ia dikelola oleh ITDC. Tetapi pada praktiknya, di samping karena banyaknya jemaah yang hadir, tetap membutuhkan pengelolaan swadaya.

Pada dasarnya, halaman depan kompleks Puja Mandala adalah ruang publik dan dikelola oleh ITDC. Namun ketika ada kegiatan keagamaan, seluruh jemaat bisa terlibat. Baru ketika sudah memasuki gerbang tempat ibadah, baik Masjid, Gereja, Wihara atau Pura, urusannya menjadi tanggungjawab masing-masing. Masalah parkir, karena sifatnya *share-public-utility*, mengandung potensi konflik cukup besar jika tidak dikelola dengan baik. Pada momentum tertentu, khususnya hari Jum'at dengan acara sholat Jum'at dan Ahad dengan pelaksanaan misa Gereja, karena keterbatasan lahan parkir, petugas parkir cukup kewalahan. Kerjasama yang sangat baik dan menunjukkan pemandangan yang menarik adalah Gereja menyediakan halaman privatnya untuk digunakan sebagai parkir jemaah shalat Jum'at, begitu pula sebaliknya. Kerjasama ini terjalin secara rutin dan suka rela. Menurut penuturan beberapa petugas dan relawan dari Gereja yang aktif menangani keamanan di sana, bagi mereka kerjasama semacam ini merupakan bentuk solidaritas, sikap saling menghormati, dan toleransi.

Lebih dari sekedar urusan keamanan, tempat parkir menjadi ruang publik yang punya arti lebih bagi jemaat dan pemuka agama di Puja Mandala. Lahan parkir juga menjadi ruang komunikasi. Para pemuka agama dan jamaahnya bertegur sapa satu sama lain di sini. Romo Venus yang menjadi pelayan di Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa menuturkan "kami biasa saling menghargai. Sehari-hari, latar depan ini [halaman] menjadi tempat untuk kami bertegur sapa antar pemeluk agama. Tetapi di dalam, kami beribadah dan saling menghargai ibadah yang lain" (wawancara dengan Venus, 19 Februari 2020). Dengan kata lain, halaman kompleks Puja Mandala menjadi ruang perjumpaan identitas dan *ruang deliberatif* di mana interaksi dan praktik-praktik deliberatif yang bersifat resiprokal sehari-hari dilakukan.

Selain itu, Puja Mandala tidak mendapat subsidi khusus dari pemerintah dalam kegiatan keagamaan. Untuk membiayai operasional dan kegiatan selama ini mengandalkan pada keuangan internal. Secara umum, kegiatan keagamaan seluruhnya dibebankan kepada institusi agama masing-masing. Dengan sistem kemandirian yang tidak birokratis, tata kelola urusan kegiatan sosial keagamaan juga lebih leluasa dan fleksibel.

Penyesuaian ritus agama terhadap adat dan tradisi

Toleransi tidak hanya mencakup apa yang dalam teori multikultur disebut perlindungan eksternal agar kelompok minoritas terlindungi identitasnya di tengah komunitas besar, tapi juga bagaimana toleransi terjalin terhadap individu dan kelompok lebih kecil dalam batas-batas toleransi secara internal (Kymlicka, 2005). Relasi internal ini menyangkut persoalan-persoalan privat

dalam rumah tangga agama. Di Puja Mandala, persoalan rumah tangga agama menjadi bagian dari praktik negosiasi. Ranah pertama menyangkut hubungan minoritas dengan struktur masyarakat, sementara yang kedua menyangkut hubungan dengan anggotanya sendiri. Pada ranah yang pertama, kelompok agama minoritas mau tidak mau dihadapkan pada konteks adat dan budaya mayoritas masyarakat Bali yang beragama Hindu.

Dalam konteks hubungan sosial-keagamaan di Pulau Bali, penyesuaian praktik agama dengan agama lain, atau dengan adat dan tradisi budaya yang dijunjung tinggi agama lain adalah suatu kelaziman. Ritual agama tidak semata dipraktikkan membabi buta tanpa mengindahkan unsur-unsur agama atau budaya lain yang memiliki kebiasaan yang seringkali bertentangan. Satu contoh adalah umat Hindu memiliki tradisi perayaan Nyepi di mana mereka menghindari keramaian untuk menyepi, sementara umat Islam memiliki tradisi yang justru cenderung pada keramaian ketika merayakan malam Idul Fitri atau Idul Adha. Kedua tradisi itu tentu bertolak belakang. Dalam kondisi demikian dibutuhkan penyesuaian diri, upaya-upaya negosiasi, dialog atau tenggang rasa. Pada tahun 1994 dan 1995, misalnya, hari raya kedua agama itu jatuh pada hari yang bersamaan, tetapi perayaan tetap berlangsung khidmat. Ibadah Nyepi tetap dilakukan. Umat Islam tidak melakukan pawai takbir keliling dan menggunakan pengeras suara seperti pada umumnya. Sementara itu, para pecalang dari umat Hindu membantu mengamankan pelaksanaan hari raya Idul Fitri (Simarmata, 2018). Hal ini merupakan bentuk penyesuaian diri, khususnya minoritas muslim, terhadap tradisi budaya mayoritas Hindu di Bali.

Upaya-upaya negosiasi dan penyesuaian diri semacam itu juga

terjadi di Puja Mandala. Sebagai timbal balik kebijaksanaan mayoritas Hindu, minoritas muslim, misalnya, juga dirasa perlu menyesuaikan diri dengan adat setempat. Selain persoalan pendirian tempat ibadah, memang problem sosial-keagamaan yang paling sering memantik konflik adalah soal penyiaran agama (Zulkarnain, 2011). Adzan adalah bagian dari penyiaran agama Islam. Praktik kumandang adzan sebagai seruan sholat lazimnya dikumandangkan dengan suara keras. Di beberapa tempat di Bali hal itu tidak menjadi masalah karena komunitas muslim memang banyak, seperti di Buleleng dan kampung-kampung Islam. Namun di Masjid Ibnu Batutah, warga muslim memilih mengumandangkan adzan dengan volume rendah sebagai bentuk penyesuaian diri dengan tradisi warga setempat.

Menurut penuturan Muchlas, 'dahulu adzan dikumandangkan dengan keras, tetapi masyarakat sekitar ada yang komplain karena merasa terganggu dengan suaranya. Setelah dimusyawarahkan dengan internal takmir dan pihak pengurus *Paguyuban*, dirasa diperlukan penyesuaian diri, dan adzan diputuskan untuk dibuat lebih lirih. Sebenarnya, persoalan adzan itu tergantung kepada kesepakatan dalam banjar masing-masing. Di tempat lain, lantunan tarhim dari Masjid bahkan berkumandang keras setiap hari' (wawancara dengan Muchlas, 19 Februari 2020).

Karakter budaya keagamaan di Bali adalah fleksibilitas menerapkan ajaran agama, dan penyesuaian diri dengan adat atau tradisi setempat. Bahkan setiap daerah memiliki variasi lokal sendiri-sendiri karena praktik keagamaan selalu mempertimbangkan *desa* (tempat), *kala* (waktu) dan *patra* (keadaan) (Simarmata, 2018). Maka praktik keagamaan di Puja Mandala juga sedikit banyak menyesuaikan diri dengan adat di

Benoa. Semisal ketika perayaan hari raya Nyepi bertepatan pada hari Jumát, jemaat muslim yang melaksanakan shalat Jumat menyesuaikan diri tidak memakai kendaraan yang bersuara bising. Mereka hanya berjalan kaki, memakai baju koko, ada juga yang memakai udheg Bali. Mereka juga tidak membuat keramaian yang kiranya dapat mengganggu umat Hindu dalam beribadah.

Di Masjid Ibnu Batutah sendiri, komunitas muslim mencoba membangun iklim inklusivitas dalam urusan internal muslim. Para pengurusnya tergolong terbuka terhadap perbedaan, karena mereka berkomitmen bahwa Masjid Ibnu Batutah adalah “milik umat”, sehingga kelompok Islam dari ormas apapun boleh membuat aktivitas di Masjid, *dengan syarat* tidak melanggar komitmen bersama tentang kerukunan beragama, dan tidak berbenturan dengan kegiatan ormas yang lain. Beberapa organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan Jamaah Tabligh, pernah melakukan kegiatan agama di sana. Di sinilah kita melihat apa yang secara konseptual disebut batas-batas toleransi (*limits of tolerance*) diterapkan.

Namun inklusivitas tentu hanya prasyarat dasar menuju toleransi yang lebih utama. Secara kualitatif, kelompok muslim Puja Mandala mengindikasikan penerimaan yang beragam terhadap ide toleransi. Tidak berpretensi mengatakan seluruh muslim sangat toleran, boleh jadi di antara mereka ada yang sebetulnya tidak toleran. Menurut sebuah penelitian tentang praktik sosial dan pemahaman muslim di sana, meski mereka secara umum dikatakan toleran, tetapi ada juga mereka toleransinya kaku, dan memilih meminimalisir interaksi dengan non-muslim karena merasa lebih aman dan nyaman secara akidah. Ada juga yang lentur toleransinya, yang berinteraksi dengan non-muslim sesuai batas-batas yang ditetapkan agama; mereka lebih

mapan secara akidah karena tidak merasa terancam. Sementara itu, sebagian mereka ada yang sangat lentur, tidak terlalu peduli soal akidah, dan lebih menekankan aspek kemanusiaan (Puspa, 2015).

Komunikasi yang baik kunci bagi penanganan konflik

Sekalipun hubungan toleransi secara umum tergolong baik dengan indeks prestasi tergolong tinggi (80,1 dan berada pada urutan ke-3 versi Kemenag 2019), tetapi konflik dan perselisihan, khususnya terkait tempat ibadah, masih menjadi persoalan secara umum di Bali. Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari identitas mayoritas dan minoritas dalam masyarakat dan melibatkan faktor sosial, politik, dan ekonomi yang cukup kompleks. Namun, menurut Cahyo Pamungkas (2014), *clash* konflik keagamaan paling banyak di Bali adalah terjadi di akar rumput, dan meski masih banyak gangguan dalam soal toleransi agama, namun hubungan minoritas mayoritas, bisa terjalin damai karena para pemimpin agama lebih mengedepankan *dialog* untuk menyelesaikan permasalahan di akar rumput.

Strategi menyelesaikan konflik atau perselisihan dengan mengedepankan dialog juga berlaku di Puja Mandala. Memang penerimaan terhadap tempat ibadah minoritas agama awalnya tidak serta merta berjalan mulus begitu saja. Meskipun begitu, perjalanan dua dasawarsa lebih memberi pengalaman berarti. Kini hubungan mayoritas Hindu dan minoritas agama di Puja Mandala tidak mengalami masalah berarti di banding tempat-tempat lain. Masyarakat sekitar sudah menerima kehadiran Puja Mandala, di samping karena eksistensinya memiliki dampak ekonomi cukup signifikan. Semua informan yang penulis jumpai tidak menyatakan

adanya persoalan konflik agama yang krusial. Para pemuka agama di Puja Mandala meyakini jalan komunikasi dan musyawarah adalah yang paling baik untuk menyelesaikan perselisihan. Hadirnya *Paguyuban* juga sebagai media komunikasi antar tokoh dan pemeluk agama. Teknologi juga dimanfaatkan untuk mempermudah teknik komunikasi. Tanpa berkomunikasi, alih-alih inklusif, hubungan sosial akan menjadi eksklusif satu sama lain.

Resiprokalitas Dalam Toleransi Respektif

Meskipun sudah dikenal luas melalui pariwisata, tetapi tahun 2019 yang lalu merupakan tahun pencapaian penting Puja Mandala dalam mempromosikan toleransi hingga level internasional melalui agenda *Interfaith and Intercultural Dialogue* di Nusa Dua. Salah satu inisiator tema agenda ini menyatakan bahwa pada awalnya isu yang dimunculkan adalah *East and West: A Dialogue*. Namun, pembedaan Barat dan Timur semacam itu kini dirasa tidak cukup relevan lagi, sehingga dipilihlah dialog lintas iman dan budaya atau *Interfaith and Intercultural Dialogue* sebagai agenda utama (wawancara dengan Mukhlis, 20 Februari 2020).

Agenda dialog agama dan budaya ini dikemas dalam tajuk *World Interfaith Harmony Week* (WIHW), kerjasama Puja Mandala dengan lembaga perdamaian internasional *The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run*. Sri Chinmoy merupakan tokoh spiritual besar dari British-India yang mengajarkan spiritualisme melalui sembahyang, meditasi dan atletisisme (www.srichinmoy.org). Kegiatan

ini diikuti oleh 100-an penggiat perdamaian dari berbagai negara. Dengan jaringan luas yang mereka miliki, lembaga ini menyuarakan spiritualisme, perdamaian dan toleransi. Secara simbolik, para delegasi diajak oleh para pemuka agama memasuki tempat ibadah di Puja Mandala, bersama-sama menyulut dan *saling menyerahkan* Obor Perdamaian, dan berdoa bersama bagi perdamaian dunia (Peacerun, 2019) (*Gambar 3*).

Hal yang menarik adalah yang disampaikan Levine dalam momentum ini yang menyinggung spiritualisme yang mendasari toleransi sebagai penerimaan dan pengakuan perbedaan, bahwa "*Spirituality is not merely tolerance. It is not even acceptance. It is the feeling of universal oneness. In our spiritual life, we look upon the Divine, not only in terms of our own God, but in terms of everybody's God. Our spiritual life firmly and securely establishes the basis of unity in diversity. Spirituality is not mere hospitality to others' faith in God. It is the absolute recognition and acceptance of their faith in God as one's own.*" (Peacerun, 2019) Bahwa toleransi dan spiritualisme adalah entitas yang berbeda. Spiritualisme bukan sekedar toleransi, bukan pula penerimaan. Meski demikian, ia dapat menjadi fondasi yang menopang mental manusia agar bersedia menerima dan mengakui perbedaan identitas agama. Hal ini memperkuat pandangan seperti dikemukakan Haryani bahwa gerakan spiritualisme dan rohaniawan asing menjadi aktor yang tak boleh dilupakan dalam menopang budaya toleransi Bali secara umum (Haryani, 2016).



Gambar 3. Tokoh-tokoh lintas agama di Puja Mandala, dipimpin pemuka Hindu, I Wayan Solo (pemegang obor), memimpin kegiatan lintas agama dengan menyalakan dan bertukar Obor Perdamaian sebagai simbol komitmen perdamaian dan toleransi. (Sumber: <https://www.peacerun.org/id/news/2019/0131/3341/gallery/#48>)

Kegiatan bergenre spiritual ini bukan kali pertama. Sebelumnya, tahun 2015, kegiatan dialog lintas iman dan budaya dilakukan pada *Parliamentary Event on Interfaith Dialogue* diikuti 17 negara. Dalam salah satu kesimpulannya, mereka menjadikan kawasan Puja Mandala sebagai model bagi toleransi agama yang patut ditiru (Waruwu, 2017).

Merayakan perbedaan, saling menghormati dan norma yang mendasarinya.

Sebagaimana dikatakan Forst (2013), konsep toleransi pada dasarnya adalah *normatively dependent concept*, artinya bersandar pada prinsip-prinsip normatif tertentu yang boleh jadi satu komunitas berbeda satu sama lain, di samping ada kemungkinan mewujudkan norma bersama. Sebagai sebuah sikap moral, selain berarti memberi kebebasan dan tidak mencampuri urusan orang lain atau *non-interfere*, atau upaya kerjasama membangun *peaceful-co-existence*, toleransi juga bermakna sikap saling menghormati dalam kesederajatan atau *mutual respect*, terutama menghormati apa yang berbeda dengan keyakinan sendiri. Dalam hal ini, komunitas agama di Puja Mandala

memiliki dasar normatif berbeda-beda untuk mengekspresikan toleransinya.

Dalam suasana kebersamaan, saat mengucapkan selamat hari besar agama masih menjadi kontroversi di luar, di kompleks Puja Mandala hal itu tampaknya bukan perkara krusial, bahkan menjadi *etiket* sosial yang wajar dan sudah menjadi tradisi. Mengucapkan selamat hari raya kepada umat lain adalah lazim sebagai bagian dari ekspresi menghormati kebahagiaan umat lain. Bahkan di beberapa daerah di Bali, seperti di Jembrana, perayaan hari raya keagamaan menjadi momentum untuk melakukan *ngejot*, yaitu tradisi memberikan aneka makanan atau *jotan* menjelang hari raya kepada tetangga yang berbeda agama. *Ngejot* dilakukan oleh mereka yang sedang merayakan hari raya untuk berbagi kebahagiaan kepada umat yang berbeda agama. Kearifan lokal menjadi modal sosial penting untuk menopang toleransi di Bali (Halimatusa'diah, 2018; Saihu, 2020).

Meski tidak dilakukan secara gegap gempita, tetapi ucapan selamat hari raya itu selalu dijumpai, bukti bahwa saling menghormati itu terjaga. Ucapan itu dilakukan lewat publikasi atau sosial media. Melalui grup *whatsapp Paguyuban*, para anggota terbiasa mengucapkan selamat pada umat lain. Ucapan selamat itu terkadang juga terbatas untuk yang merayakan, tetapi menyelipkan doa untuk kerukunan dan kedamaian bersama serta keselamatan umat manusia. Seperti misalnya, umat Katolik Santo Paroki mengucapkan selamat Galungan kepada umat Hindu. Umat Hindu juga mengucapkan selamat merayakan Galungan dan mendoakan untuk semua. Pesan-pesan harmonis dan doa-doa keselamatan disampaikan, bahkan dengan menyebut identitas Tuhan agama lain, seolah merupakan sapaan untuk berbagi keselamatan dan kedamaian bersama.

Suster Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa menuturkan, bahwa pada prinsipnya agama [kami] di sini mengajarkan untuk saling menghormati satu sama lain. 'Umat muslim bersembahyang di Masjid, kami bersembahyang di Gereja, dan di antara kami saling menghargai dan saling mengerti satu sama lain. Di Gereja, kami mendidik jemaat melalui pertemuan rutin untuk *sharing* bersama tentang berbagai persoalan sosial yang ada. Di situ kami mengingatkan perlunya menghormati keyakinan agama lain, mendidik agar bersikap terbuka dan menghargai perbedaan. Seusai ibadah, kami membuka kesempatan berbagi dengan jemaat. Kami semua ingin damai. Ajaran agama Katolik sangat menekankan tentang kasih. Menebar kasih kepada orang lain menjadi dasar toleransi' (wawancara dengan Suster, 19 Februari 2020).

Berbeda dengan umat Katolik yang menebarkan sikap hormat atas dasar keyakinan mereka tentang kasih, umat Hindu menghayati arti penting *dharma* dalam kehidupan yang mereka rayakan ketika Galungan. *Dharma* adalah kebaikan universal lawan dari *adharma* yang berarti kejahatan. Semisal ucapan dalam rangka perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini untuk memanifestasikan Dharma bagi kebaikan seluruh umat manusia: "Untuk saudaraku yang merayakan. Om Swastiastu. Rahajeng Nyanggra Rahina Galungan & Kuningan, dumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa mapaiice panugraha sumangdene sareng sami ngemanguhin kerahayuan lan kerahajengan. Dumogi Dharma prasida ngasorang Adharma, "Jagadhita ya ca iti Dharma", Om Santhi Santhi Santhi, Om." Terjemahan: "Selamat menyambut hari Galungan dan Kuningan, semoga Ida Sang Hyang Widi memberikan anugerahnya agar semua umat mendapatkan keselamatan. Semoga *Dharma* (Kebaikan) mengalahkan *Adharma* (Kebatilan), kesejahteraan dunia berlandaskan *Dharma*. Kesejahteraan

di dunia itulah *Dharma*" (Pesan yang disebar di grup *Paguyuban*).

Selain keyakinan terhadap *Dharma*, ajaran *Sad Kerti* juga sangat melekat dalam keyakinan umat Hindu Bali yang mendasari sikap toleransi. Wisnu Bawa Tenaya, Kepala Persada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menjelaskan, 'bahwa pemahaman spiritual dan nilai-nilai keutamaan holistik sangat berpengaruh bagi sikap toleransi. Ajaran *Sad Kerti* menjadi nilai kearifan lokal bagi masyarakat Bali, bahwa ada enam jalan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan, baik keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran *Tri Hita Karana* tentang tiga dimensi keharmonisan holistik. *Sad* artinya enam, *Kerti* artinya jalan harmoni. Salah satu *Kerti* yang perlu dihayati untuk mewujudkan toleransi adalah *Samudra Kerti*, bahwa hendaknya manusia memiliki sifat seperti air (*Samudra*) yang lentur dan tidak keras sehingga mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, artinya tidak eksklusif (wawancara dengan Tenaya, 20 Februari 2020).

Di balik sikap toleransi umat Budha, mereka memiliki keyakinan tentang *Mudita Citta*, anjuran perasaan gembira ketika melihat orang lain berbuat baik atau mendapatkan kebaikan, sehingga ketika umat Hindu merayakan Nyepi, mereka mengekspresikan *Mudita Citta* kepada yang merayakan. Bahkan dalam Budhisme, turut merasakan kegembiraan atas kebaikan yang dialami orang lain dianggap sebagai salah satu dari sifat mulia yang harus ditegakkan. Oleh karena itu, dalam ucapannya bagi umat Budha di Puja Mandala, mereka mengucapkan "Dengan *Mudita Citta* Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi 1 Caka 1942... Semoga Semesta Raya Damai dan Bahagia" (pesan perdamaian yang disebar di grup *Paguyuban*).

Norma agama boleh jadi berbeda, satu kelompok meyakini tentang kasih, *Dharma*, *Sad Kerti*, *Mudita Citta*, atau mungkin *Tasamuh* dalam Islam, tetapi titik temunya sama, yakni preskripsi atau imperatif untuk saling menghormati orang lain meski ia memiliki keyakinan yang berbeda. Puja Mandala dengan atmosfir kedamaiannya telah menunjukkan arti merayakan perbedaan, dan pada momen intim tertentu sekat sebagai mayoritas atau minoritas tak terlalu relevan lagi. Penekanan kepada kesamaan komitmen toleransi meski berangkat dari identitas agama yang berbeda itulah pluralisme.

Kebajikan sipil (civic virtue) dan peran FKUB

Terlepas statusnya sebagai institusi keagamaan, secara *moral* Puja Mandala telah menghadirkan toleransi sebagai ajaran agama sekaligus juga nilai moral sosial yang dihayati bersama di ruang publik sebagai *civic virtue* atau kebajikan publik. Menurut Sudharsana, Puja Mandala telah mendidik dan menebar pesan moral pada publik tentang arti penting toleransi untuk mewujudkan kedamaian dalam hidup bersama, juga dalam praktik sehari-hari (Sudarsana et al., 2019). Pesan moral toleransi sebagai koeksistensi damai dan semangat menghargai perbedaan identitas agama ini sangat diperlukan di tengah umat beragama di Bali yang sedang mengikis kecurigaan dan membangun kembali kepercayaan (*trust*) antar pemeluk agama dalam bayang-bayang memori serangan terorisme Bom Bali I & II pada tahun 2002. FKUB Badung juga cukup suportif menjalin kebersamaan seperti ditunjukkan dalam kegiatan Doa Bersama Lintas Agama di Puja Mandala dalam rangka menjaga bangsa dari ancaman teror (Mangupura, 2018).

Namun, atmosfir positif di Puja Mandala tak bisa bertahan tanpa ditopang

struktur kebijakan yang cukup bertingkat yang turut mengawal, mendorong dan mengawasi praktik toleransi di sana. Di samping ada pengawasan dari ITDC, tokoh-tokoh agama yang terlibat di Puja Mandala pada umumnya berjejaring dengan elemen sosial dan organisasi keagamaan yang lebih tinggi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PDHI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), dan Keuskupan. Mereka bernaung dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) yang diketuai Ida Penglingsir Putra Agung Sukahet. Mereka secara rutin menyelenggarakan pertemuan kerukunan antarumat beragama. Penulis sempat menghadiri Sarasehan pada tahun 2020 yang lalu (*Gambar 4*). Selain *Paguyuban* internal Puja Mandala, FKUB memiliki andil cukup besar bagi perwujudan toleransi agama, dan Puja Mandala diyakini sebagai ikon toleransi di Bali. Ketika dipertanyakan soal kemungkinan Konghucu juga akan membangun klenteng di Puja Mandala sehingga lengkap enam agama dan menjadi ikon toleransi yang representatif, tampaknya ada pesimisme, terutama karena faktor historis dan juga kecilnya jumlah penganut Konghucu di sana.



Gambar 4. Para tokoh perwakilan dari agama-agama di Bali, beberapa di antaranya termasuk pemuka Puja Mandala, mendeklarasikan ikrar komitmen menjaga toleransi dalam perbedaan di Bali dalam kegiatan rutin Sarasehan Kerukunan Beragama. (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2020)

Strategi kultural menjaga keharmonisan antar-umat beragama.

Dalam studi ini, penulis mewawancarai I Ketut Widya (20 Februari 2020), kepala bimas agama Hindu di Kementerian Agama dalam forum umat beragama Bali. Ia menjelaskan bahwa toleransi di Bali pada hakikatnya sekedar jalan, instrumen atau metode untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Namun, untuk mewujudkan toleransi agama perlu strategi pengembangan yang komprehensif. Sejauh berkaca pada budaya di Bali, untuk mewujudkan karakter masyarakat yang lebih toleran perlu *strategi kebudayaan* yang komprehensif.

Agama dan keberagamaan tidak dapat dilepaskan dari unsur kebudayaan khususnya seni, filsafat dan ilmu pengetahuan. Suatu agama tentu mengajarkan kebenaran yang diyakini bagi seseorang. Akan tetapi, dalam mengekspresikan keagamaannya, terlebih membawakan nilai-nilai keagamaan dan keyakinannya kepada orang lain tidak boleh sewenang-wenang. Peranan seni sangat besar bagi budaya agama, yakni untuk melembutkan hati, menjadi lebih sensitif, lembut dan tidak keras hati. Kelembutan hati sangat penting bagi sosial-keberagamaan, karena jika tak didasari kelembutan, orang yang beragama dapat saja terjebak ke dalam kebekuan, bahkan intoleransi dan kekerasan. Kebenaran dan kebaikan yang dikandung oleh agama harus dibawakan dengan dibalut nilai keindahan”.

Filsafat juga memiliki arti penting untuk mendidik kebijaksanaan, untuk membuat pemeluk agama menjadi lebih bijak, karena filsafat mengajarkan orang mencintai kebijaksanaan. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berfungsi membuat seseorang lebih cerdas dan berpengetahuan sehingga mampu berpikir secara terbuka. Dalam konteks keagamaan di Bali, keagamaan

dipadukan dengan seni, filsafat, dan pengetahuan melalui upacara-upacara dan kesenian seperti wayang. Dengan medium wayang, nilai-nilai luhur bahkan kebenaran dapat disampaikan kepada audien dengan penuh kelembutan, kearifan, dan kebijaksanaan. Dengan hati yang lembut, arif dan bijaksana, orang akan lebih toleran terhadap identitas agama lain. Perpaduan agama dan seni, didasari kebijaksanaan filsafat dan ilmu pengetahuan, membuat cara beragama menjadi lebih lembut dan toleran di Bali. Melalui seni dan kelembutan hati, ekspresi beragama yang berbudaya, ditambah spiritualitas tentang ruang bersama, sekat-sekat identitas agama menjadi cair, lebih inklusif, lebih arif dalam menerima perbedaan (wawancara dengan Widya, 20 Februari 2020).

Penulis juga menjajaki pendapat Michael Northcott, filsuf dari Edinburgh. Dalam percakapan pribadi dengan penulis ia menjelaskan bahwa toleransi menjadi persoalan penting dalam etika. Menurutnya, untuk membangun masyarakat toleran perlu pendekatan kultural, yang sejatinya dimulai dari keluarga guna menanamkan toleransi sejak dini. Toleransi merupakan bagian dari praktik keutamaan (*virtue*) yang membuat orang bersikap terbuka terhadap orang lain, baik yang berasal dari keyakinan berbeda, budaya daerah yang berbeda, dan identitas berbeda. Toleransi sejatinya dimulai dari dalam lingkup keluarga, paling kecil, hingga komunitas antar-iman (*interfaith*) dan komunitas budaya (*inter-cultural*). Bahkan toleransi merupakan nilai yang niscaya dalam hubungan dengan lingkungan. Seperti diajarkan Aquinas, sikap toleran harus didasari rasa cinta, harapan dan kemurahan hati. Toleransi perlu dikembangkan menjadi karakter, dan untuk membentuk karakter dimulai dari keluarga melalui *proses parenting* sejak kecil. Mendidik orang menjadi berkarakter semestinya dimulai dari

keluarga. Dalam keluarga, perlakuan kasih sayang orang tua terhadap anak, dan mendidik anak dengan baik berarti juga menanamkan sikap toleran (Percakapan dengan Northcott, 20 Februari 2020).

Barangkali pengalaman salah satu informan dari pemuka muslim yang kini sebagai anggota MUI Bali, relevan dengan pandangan Northcott di atas. Ia menuturkan pengalamannya tentang toleransi dalam lingkup keluarga di Bali. Menurutnya toleransi agama di Bali sangat baik. Ia sendiri, terkadang diingatkan untuk shalat oleh umat lain. Pernah suatu saat sedang berkunjung ke rumah warga Hindu Bali yang tak ia kenal di sebuah desa. Saat memasuki waktu shalat, mereka justru mengingatkan shalat, menyediakan tikar bersih untuk sajadah, dipersilahkan beribadah di tempat yang layak. Ia juga seringkali diingatkan soal makanan halal, ketika memasuki warung yang mengandung makanan yang tidak halal, ia diingatkan dan ditunjukkan warung yang menyediakan makanan yang halal. Dengan kata lain, di dalam keluarga pun ada keterbukaan, bahkan terhadap orang asing sekalipun (Komunikasi pribadi dengan Ujang, 20 Februari 2020).

SIMPULAN

Deskripsi di atas menunjukkan potret dan konteks toleransi agama di Puja Mandala, yang oleh banyak sumber dianggap sebagai percontohan. Citra Puja Mandala sebagai ikon toleransi agama semakin diterima luas di Bali. Hadirnya Puja Mandala merupakan bentuk solidaritas kelompok dalam suatu komunitas. Namun di sisi lain, ia merepresentasikan penerimaan kelompok mayoritas terhadap eksistensi minoritas dengan batas-batas tertentu. Kondisi harmoni dan toleransi tidak lepas dari konteks ruang waktu tertentu. Boleh jadi pula antara kondisi harmoni dan diskriminasi ada ruang negosiasi re-

negosiasi yang selalu dinamis dan tidak statis seperti dipikirkan banyak orang.

Puja Mandala telah mengembangkan diri melestarikan toleransi dengan kemandirian. Eksistensinya merupakan hak tradisional dan ekspresi toleransi sebagai kekayaan budaya yang harus dilindungi. Diyakini oleh masyarakat Bali sebagai manifestasi *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerti*, ia didasari oleh hak tradisional yang tumbuh (Pasal 18 B UUD 1945) dan secara material tidak kontradiktif dengan prinsip NKRI, bahkan justru memperkuat bangunan persatuan-kesatuan bangsa, bahkan dapat berkontribusi terhadap pemajuan kebudayaan nasional. Sudah seharusnya, sesuai pasal 32 UUD 1945, pemerintah dan masyarakat mengambil peran lebih besar untuk menjamin, memelihara, mengembangkan dan memperluas budaya toleransi beragama di Puja Mandala.

Pengembangan diri tersebut, ditinjau dari aspek teoritik, menunjukkan salah satu konsepsi terpenting toleransi yaitu penghargaan terhadap minoritas. Hubungan toleransi ada yang kategoris mayoritas-minoritas, ada juga yang menuntut kesetaraan dan menganggap mayoritas-minoritas tidak relevan lagi. Mandala sendiri merupakan salah satu fase dari apa yang dikatakan Schaublin sebagai bentuk negosiasi identitas agama antara mayoritas dan minoritas dalam relasi yang dinamis untuk menyeimbangkan hubungan satu sama lain sebagai mayoritas dan minoritas di Pulau Bali. Sudah lazim hubungan itu sesekali menghadapi batu sandungan, lalu direnegosiasi, diteguhkan lagi (rekonfirmasi) atau ditata ulang (rekonfigurasi). Puja Mandala juga merupakan produk afirmasi pemerintah bagi kelompok minoritas. Meskipun tidak ada fakta asimilasi di Puja Mandala, tetapi kebijakan dan budaya toleransi menunjukkan pluralisme agama, dengan

pengakuan hak-hak dan batas-batas tertentu bagi kelompok minoritas.

Pada awalnya, Puja Mandala mengejawantahkan matra toleransi sebagai sikap permisif (*permissive conception*). Konsep ini konteksnya adalah kelompok, dalam hal ini mayoritas dan pemerintah terhadap minoritas. Hal ini jelas adanya dari sejarah berdirinya Puja Mandala, di mana mayoritas memberikan ruang kebebasan kepada minoritas agama. Secara teoritik konsep ini lemah karena cenderung menempatkan kelompok mayoritas sebagai subjek utama toleransi. Namun demikian, mereka tumbuh dengan relasi toleransi sebagai ko-eksistensi damai (*peaceful coexistence*), yang tampak dari kerjasama dan minimalnya tingkat konflik keagamaan. Secara teoritik, model pragmatis ini masih rentan terhadap konflik kepentingan sehingga belum cukup matang.

Dalam perkembangan mutakhirnya telah berproses menuju matra ketiga demi mewujudkan toleransi yang lebih dewasa dan matang meski tampak masih minimalis. Matra ini sebenarnya menuntut upaya lebih progresif sebab konsepsi toleransi sebagai saling menghargai sesungguhnya mengandaikan kesadaran

individu untuk betul-betul saling menghargai perspektif dan keyakinan orang lain dalam kesederajatan yang kualitatif, menanggalkan dominasi, bahkan saling bertukar posisi dalam kekuasaan, tanpa harus melakukan asimilasi keyakinan satu sama lain. Hal itu tampak dari kegiatan-kegiatan yang bercorak dialog lintas agama dan budaya. Semua pengalaman itu menunjukkan proses transformasi toleransi menuju kematangannya, *costly-tolerance*, istilah Koffeman, yang dari masa ke masa diupayakan agar senantiasa lestari dan semakin kokoh di tengah globalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada KEMENRISTEK-BRIN yang turut mensponsori penelitian tentang penguatan toleransi bagi pemajuan kebudayaan ini melalui Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS) 2020. Kepada tim redaksi Jurnal Harmoni yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menampilkan hasil kajiannya dalam terbitan edisi 2020, serta kepada para reviewer atas segala masukan dan kritikan sehingga terbitnya artikel ini.

DAFTAR ACUAN

- Al-Khanif. (2015, October). *The paradox of religious (in)tolerance in Indonesia*. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/16/the-paradox-religious-intolerance-indonesia.html>.
- Ali-Fauzi, I. (2017). *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi*. Makalah disampaikan dalam Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Beragama di Hotel Borobudur Jakarta
- Balint, P. (2016). *Respecting toleration: Traditional liberalism and contemporary diversity*. Oxford University Press.
- Burhani, A. N. (2014). The Ahmadiyya and the Study of Comparative Religion in Indonesia: Controversies and Influences. *Islam and Christian-Muslim Relations*. <https://doi.org/10.1080/09596410.2013.864191>
- Burhani, A. N. (2019). *Menemani Minoritas: paradigma Islam tentang keberpihakan dan pembelaan kepada yang lemah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhani, A. N. (2020). *Dilema Minoritas di Indonesia: Ragam, Dinamika dan Kontroversi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Di Blasi, L., & Holzhey, C. F. E. (2014). *The Power of Tolerance: A Debate*. Columbia University Press.
- Fealy, G., & Ricci, R. (2019). *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Fernández, C. (2008). Tolerance in the 21st century: A revised liberal defense. *CFE Working Papers*; 34.
- Forst, R. (2012). *Tolerance*. <https://plato.stanford.edu/entries/tolerance/>
- Forst, R. (2013). *Tolerance in Conflict*. Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2019). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Pustaka LP3ES.
- Halimatusa'diah. (2018). Peranan Modal Kultural dan Struktural Dalam Menciptakan Kerukunan Antarumat Beragama. *Harmoni*, 1(17), 43–65.
- Haloho, L. (2014). Puja Mandala: Diversity and Symbol of Religious Harmony in Bali (1994–). *Proceeding Book-International Seminar Bali Hinduism, Tradition and Interreligious Studies*.
- Haryani, E. (2016). Menebar Spiritualitas, Menjaga Budaya: Peran Rohaniwan Asing dalam Dinamika Kehidupan Keagamaan di Bali. *Harmoni*, 15(2), 81–95.
- Kersten, C. (2018). *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*. Bandung: Mizan.
- Koffeman, L. (2016). Costly Tolerance. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 72(1).
- Kymlicka, W. (2005). *Kewarganegaraan Multikultural*. Pustaka LP3ES.
- Mangupura. (2018). *Doa Bersama Lintas Agama*. <https://bali.kemenag.go.id/badung/berita/7238/doa-bersama-lintas-agama>
- Marshall, P. (2018). The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(1), 85–96.

- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press.
- Pamungkas, C. (2014). Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial: Studi Kasus Hubungan Mayoritas Dan Minoritas Agama Di Kabupaten Buleleng. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 9(2), 285–316.
- Peacerun. (2019). *Peace Run Observes WIHW at Puja Mandala, Bali, Indonesia*. <https://www.peacerun.org/id/news/2019/0131/3341/>
- Puspa, P. S. N. (2015). *Pemahaman Pemuka Agama Islam Komplek Puja Mandala Terhadap Ayat-Ayat Toleransi Beragama Yang Mempengaruhi Perilaku Umat Islam di Sekitarnya*. UIN Sunan Kalijaga.
- Putra, I.N.D. (2017). Puja Mandala Nusa Dua: Monumen Bhineka Tunggal Ika Bali Untuk Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Putra, I Nyoman Darma. (2014). Puja Mandala: An Invented Icon of Bali's Religious Tolerance? In *Between Harmony and Discrimination: Negotiating Religious Identities within Majority-Minority Relationships in Bali and Lombok* (pp. 330–353). Brill.
- Raharjo, M. D. (2011). Fanatisme dan Toleransi. In *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan.
- Rahman, F. (2019). Potret Sosial Keberagaman Yang Harmonis Di Puja Mandala, Nusa Dua Bali. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 14(1), 54–73.
- Saat, N., & Ibrahim, A. (2019). *Alternative Voices in Muslim Southeast Asia: Discourses and Struggles*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Saihu. (2020). Harmoni Hindu-Muslim di Bali Melalui Kearifan Lokal: Studi di Kabupaten Jembrana: Harmony Hindu-Muslim in Bali Through Local Wisdom: Study in Jembrana District. *Harmoni*, 19(1), 7–27.
- Setyabudi, M. N. P. (2019a). Memperlebar Batas Toleransi dan Membela Hak Minoritas (Telaah atas Karya Ahmad Najib Burhani). *Harmoni*, 18(1), 570–588.
- Setyabudi, M. N. P. (2019b). Toleransi: dari Pengalaman Sejarah Menuju Konstruksi Teoritis. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 103–111.
- Setyabudi, M. N. P. (2020). Konsep dan Matra Konsepsi Toleransi dalam Pemikiran Rainer Forst. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 81–94.
- Simarmata, H. T. (2018). *Indonesia Zamrud Toleransi*. Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia. PSIK-Indonesia.
- Suaedy, A. (2017). *Intoleransi, Revitalisasi Tradisi, dan Tantangan Kebinekaan Indonesia*. Abdurrahman Wahid Centre, Universitas Indonesia.
- Sudarsana, I. K., Mahardika, I. G. N. A. W., Wiguna, I. M. A., Juliantari, N. K., & Warta, I. N. (2019). The Existence of Puja Mandala in Manifesting Tolerance Education. *1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018)*.
- Sugiharto, B. (2017). Toleransi dan Batas-Batasnya. In *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-Batas Toleransi. Seri Studi Kebudayaan 1*. Prodi Antropologi Universitas Brawijaya.
- Sugiharto, B. (2019). *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi: Kajian Filosofis atas Permasalahan Budaya Abad ke-21*. Jakarta: Pustaka Kanisius.

- van Bruinessen, M. (2014). *Conservative turn: Islam Indonesia dalam ancaman fundamentalisme*. Bandung: Mizan.
- Waruwu, D. (2018). Utilization of the Mandala Public Area as a Tolerance Model in Bali Province. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 22(2), 9–15.
- Waruwu, Dermawan. (2017). Kawasan Puja Mandala Wujud Kearifan Lokal dan Destinasi Wisata Spiritual dalam Pengembangan Model Toleransi di Indonesia. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 3(1).
- Waruwu, Dermawan, & Pramono, J. (2018). Keunikan Toleransi Di Kawasan Puja Mandala Nusa Dua Bali. *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 1(1).
- Watch, H. R. (2019). *World Report*. <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/indonesia>
- Zuhro, S. (2017). Merawat Kebhinekaan. In *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-Batas Toleransi. Seri Studi Kebudayaan 1*. Prodi Antropologi Universitas Brawijaya.
- Zulkarnain, I. (2011). Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya. *Jurnal Kajian*, 16(4), 681–705.

Daftar Informan

- Haris. (18 Februari 2020). Wawancara Pribadi.
- Muchlas, M. (16 Februari 2020) Wawancara Pribadi.
- Mukhlis, R. (20 Februari 2020) Wawancara Pribadi.
- Northcott, M. (16 Februari 2020), Wawancara pribadi
- Syamsuddin. (18 Februari 2020). Wawancara pribadi.
- Ujang. (20 Februari 2020). Percakapan pribadi.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Venus (19 Februari 2020). Wawancara pribadi.
- Widya, I. K. (20 Februari 2020). Wawancara pribadi